

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGARA TIMUR PERIODE 2013-2018 DITINJAU DARI UU NOMOR  
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**

**OLEH**

**Marsianus Edon**

**Nim: 1602190015**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA 2019**

**Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode  
2013-2018 Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan**

**Oleh**

**Marsianus Edon**

**Nim: 1602190015**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**

**Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum**

**Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**



**PROGRAM PARCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONEESIA  
JAKARTA 2019**

**Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode  
2013-2018 Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan**

**Oleh**

**Marsianus Edon**

**Nim: 1602190015**

**Tesis**

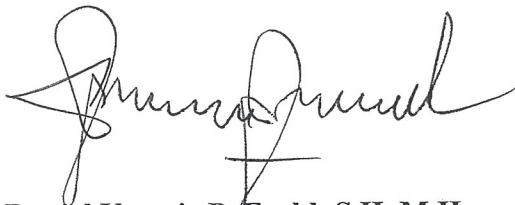
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**

**Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum**

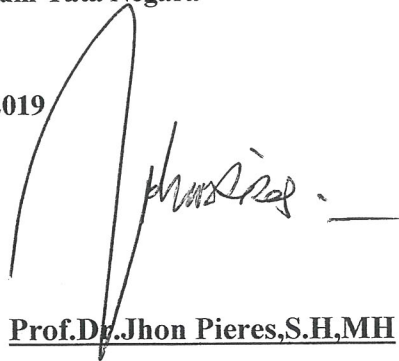
**Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**

**Jakarta, Mei 2019**



**Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H, M.H**

**Pembimbing 1**

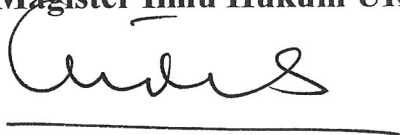


**Prof. Dr. Jhon Pieres, S.H, MH**

**Pembimbing II**

**Mengetahui,**

**Program Magister Ilmu Hukum UKI**



**Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H, M.H**

**Kaprodi**

**Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode  
2013-2018 Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan**

**Oleh**

**Marsianus Edon**

**Nim: 1602190015**

**Tesis**

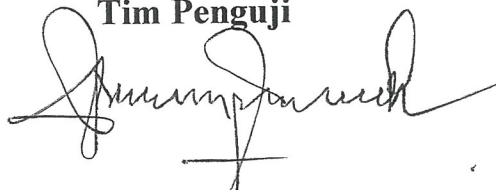
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**

**Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum**

**Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**

**Tim Penguji**



**Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H, M.H**

**Ketua**



**Prof. Dr. Jhon Pieres, S.H, MH**

**Anggota**



**Dr. Maruar Siahaan, S.H**

**Anggota**

## **Pernyataan**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya yakni tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik(Sarjana, Magister), baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan , rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta , 26- Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan

Marsianus Edon  
Nim :1602190015

## **Abstrak**

Nama: Marsianus Edon

Nim : 160219005

Judul : Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018

Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan daerah provinsi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Ketentuan undang-undang mengatur dua syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undang termasuk peraturan daerah tingkat provinsi. Dua syarat tersebut antara lain adalah syarat formil dan syarat materil. Syarat formil berkaitan dengan proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi yang diatur dalam peraturan daerah provinsi. Selain kedua syarat di atas, UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi, salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga penulisan tesis ingin melakukan kajian secara lebih lanjut terkait dengan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat normatif. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Melihat pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan pada pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013-2018. Melihat kesesuaian antara ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan perda provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013-2018. Keberadaan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan periode 2013-2018 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicabut oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri.

Kata Kunci : Pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pembimbing I : Dr.Daniel Yusmic P.Foekh,S.H,M.H

Pembimbing II : Prof.Dr.Jhon Pieres,S.H,M.H.

## **ABSTRACT**

Name : Marsianus Edon

NIM : 160219005

Title of Thesis : Establishment of East Nusa Tenggara Provincial Regulations 2013-2018  
Judging from Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations

Establishment of provincial regulations refers to the provisions of Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations. The provisions of the law regulates two main requirements in the formation of legislation including provincial level regulations. The two conditions are formal and material requirements. Formal requirements relate to the process of establishing provincial regulations and material requirements relate to the contents stipulated in provincial regulations. In addition to these two conditions, Law No. 12 of 2011 regulates principles in the formation of provincial regulations. One of them is the principle of compatibility among the type, hierarchy, and contents of rules in the formation of legislation. Through a normative research approach, this thesis examines the application of the principle of compatibility in the formation of East Nusa Tenggara provincial regulations during the 2013-2018 administration period. The results of the analysis in this study indicate that the existence of the East Nusa Tenggara provincial regulation in the 2013-2018 period has not been fully implemented in accordance with the provisions of Law No. 12 of 2011. The principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules in the law has not been fully implemented by the East Nusa Tenggara Provincial Government. This can be proven by several provincial regulations which were revoked by the central government through the Ministry of Home Affairs.

Key Words : Establishment of East Nusa Tenggara provincial regulations; principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules; Law No. 12 of 2011

Advisor I : Dr.Daniel Yusmic P.Foekh,S.H,M.H

Advisor II : Prof.Dr.Jhon Pieres,S.H,M.H.



### **Ucapan Terima Kasih**

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono , S.H.,M.H.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H, M.H.,selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr.Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H, selaku Pembimbing Satu yang telah meluang waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis khususnya untuk penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof.Dr.Jhon Pieres,S.H., M.H, selaku pembimbing dua yang telah memberikan waktu,tenaga dan pikiran kepada penulis dalam memberikan bimbingan khususnya untuk penyelesaian tesis ini.
5. Tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan serta arahan untuk dapat menyelesaikan tesis ini
6. Seluruh Dosen dan Staf Pasca Sarjana Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu , penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa Pasca Sarjana UKI
7. Kedua orang Tua Tercinta Ayah Stefanus Jaru dan Ibu Petronela Dules, atas segala doa dan cintanya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pasca Sarja UKI

8. Adik –Adikku Tercinta, Rio, Epifany, Wengsi dan Lodi, atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik di Pasca Sarjana UKI
9. Romo Adrianus Budi, MSC, yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan studi dengan baik di Pasca Sarja UKI.
10. Om Leonardus Mudin yang memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga pelaksanaan studi magister ilmu hukum di Pasca Sarjana UKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar.
11. Abang Benny K. Harman, yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pasca Sarja UKI.
12. Kakanda Yosef Sampurna Nggarang yang memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Pasca Sarjana UKI Jakarta.
13. Kepala Biro Hukum Provinsi NTT dan Staf yang memberikan bantuan kepada penulis dalam proses pelaksanaan penelitian tesis ini.
14. Sekretaris DPRD Provinsi NTT dan Staf yang memberikan bantuan dan kerja samanya terutama dalam proses penelitian tesis ini.
15. Kepala Biro Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi dan seluruh Staf yang memberikan bantuan dan kerja samanya terutama selama penulis melakukan proses penelitian tesis ini.

16. Teman-teman satu angkatan 2016, khususnya Program Hukum Tata Negara, Kebersamaan selama dua tahun menjadi modal yang sangat berharga untuk masa depan.
17. Teman-Teman seperjuangan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Periode 2016-2018 atas Doa dan dukungannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Pasca Sarja di UKI.
18. Rekan-Rekan seperjuangan di Media Dawainusa.com atas Doa dan supportnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga perkuliahan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jakarta, 26 Oktober 2018

Marsianus Edon

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan tuntutan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini dengan judul ” **Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018 Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**” tepat pada waktunya.

Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang pasca sarjana dan meraih gelar Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiha dalam bentuk tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi tesis sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan maupun dari segi teknik penulisannya. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah dalam bentuk tesis dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, seluruh civitas akademika Universitas Kristen Indonesia dan pembaca yang ingin mengembangkan penelitian yang sama di masa akan datang.

Jakarta, Oktober 2018

Penulis

## Daftar Isi

Halaman Persetujuan Sidang Peserta Ujian.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Abstrak .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Kata Pengantar .....	ix
Daftar isi.....	x
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konsep dan Teori .....	8
E. Metode Penelitian .....	12

F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II Tinjauan Teori.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	16
B. Teori Perundang-Undangan .....	33
C. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan .....	43
<b>BAB III Perihal Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi .....</b>	<b>53</b>
A. Kedudukan PERDA Provinsi Dalam Hierarki Perundang-Undangan.....	53
B. Materi Muatan Dalam Pembentukan PERDA Provinsi.....	62
C. Penyusunan Program Legislasi PERDA Provinsi.....	65
D. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi .....	70
E. Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi .....	73
<b>BAB IV Pembahasan dan Hasil.....</b>	<b>80</b>
A. Program Legislasi Daerah Provinsi NTT Periode 2013-2018 .....	80
B. Penerapan Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan .....	110
C. PERDA Provinsi NTT Dalam Kategori Bermasalah Periode 2013-2018 .....	126
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	144
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>146</b>

